

**IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI DALAM KESETARAAN
GENDER DI LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH
(Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare)**

**Anwar
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare**

anwarsani@stainparepare.ac.id

Abstract: This paper describes the reality of gender equality that occurs in madrasah education institutions. Madrasahs as educational institutions with Islamic heritage have not been able to escape from the pattern of relationships that create gender bias in education systems and planning. Gender terminology is always the basis of consideration to determine the position and role of management and the level of participation in education. It is constructed by at least two main points, namely religious ideology which is the foundation of the ideology of understanding, attitude and behavior about gender equality. Furthermore, religious ideology undergoes a process of assimilation at the cultural level so as to form an elementary view that men have social advantages compared with women.

Keywords: Patriarchal Culture, Gender Equality, Madrasah

Pendahuluan

Istilah Gender jika dilihat perspektif sosiologi merupakan salah satu unsur dengan fungsi equilibrium yang dapat menjaga kestabilan sosial agar terpola keteraturan. Hal yang demikian, dalam pandangan Talcott Parsons, sebagai fungsi *integration* dalam system tindakan.¹ Pandangan seperti ini, semestinya menjadi landasan sosial untuk menciptakan pendidikan yang berbasis pada kebebasan dan persamaan. Karena ideologi pendidikan sebenarnya adalah kebebasan

¹George Ritzer, dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Alimandan, dengan judul "Teori Sosilogi Moderen", (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 121

dan demokratisasi sebagai upaya pemenuhan hak-hak esensial manusia.² Pendidikan melintasi batas-batas diskriminasi karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan agama.³ Karakteristik pendidikan yang demikian mengenyampingkan segala unsur perbedaan dan berimplikasi terjadinya proses penguatan terhadap pemenuhan hak-hak secara berkeadilan, kesetaraan, dan mengandalkan potensialitas seseorang. Realitas sosial pendidikan seringkali memperlihatkan gejala inkonsistensi dengan aspek ideologinya. Karena direduksi dengan pandangan yang bersumber dari sistem nilai yang diyakini oleh masyarakat, bahkan terkadang, kondisi eksternal menginjeksi pandangan yang merusak sistem demokratisasi dan kebebasan dalam pendidikan. Misalnya, pandangan kultur patriarkis membias ke dunia pendidikan. Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan juga terlibat dan tidak bisa melepaskan identitasnya dari arus nilai dan pandangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai egalitarianisme merupakan fondasi utama terhadap norma-norma sosial dalam Islam, seyogyanya hal itu termanifestasikan secara holistik di lingkungan madrasah, mengingat madrasah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya cara pandang, pola sikap dan pola perilaku berkeadilan dan tidak diskriminatif dan mengabaikan *stereotype* gender.

Tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana pendidikan dan relasi kesetaraan gender di Madrasah. Apakah pendidikan di madrasah menunjukkan keterlibatan dalam pengarusutamaan gender, mengingat

²Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Cet. I; (Jakarta: Fajar Indonesia Offset, 2007), h. 16

³Nursyahid H.N, *Undangn-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Cet.I; (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003), h. 8

lembaga pendidikan ini mempunyai pandangan, wawasan, bahkan pola sikap dan perilaku yang berbasis pada keagamaan. Dan pada aspek-aspek apakah dalam sistem pendidikan di Madrasah menimbulkan bias gender.

Terminologi Gender

Konsep gender adalah suatu terminologi yang berbeda dengan konsep jenis kelamin. Konsep biologis adalah perbedaan yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena faktor kodrati. misalnya perempuan memiliki alat reproduksi; mengandung, melahirkan. Perbedaan biologis ini bersifat permanen, tidak dapat dipertukarkan, sebagai suatu ketentuan yang pasti dari Tuhan.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, seperti dikutip oleh Nasruddin Umar, gender berarti “jenis kelamin”. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia*⁴ dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan itu Linda L. Lindsey seperti dikutip oleh Nasruddin Umar, menegaskan bahwa gender adalah semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.⁵

Realitas perbedaan gender (*gender different*) telah teraplikasi sedemikian rupa dalam relasi sosial, suatu hal yang dipicu budaya patriarki, sistem pemikiran keagamaan, dan aturan-aturan formal yang deskriminatif, menyebabkan perempuan termarginalisasi.⁶ Juga

⁴Umar, Nasaruddin,. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, Cet.I; (Jakarta:: Paramadina, 2001), h. 34

⁵Ibid, h. 34

⁶Amelia Fauzia, et. al, *Realitas dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, Cet.I; (Jakarta: McGill IAIN-Indonesia, 2004), h. 18-22

menjadi politik reproduksi (*polities of reproduction*) melalui sistem pengaturan reproduksi yang merugikan perempuan dan menghiraukan laki-laki, misalnya keluarga berencana dan akibat-akibat kesehatan bagi perempuan yang memberikan pembatasan fertilitas perempuan dengan mengabaikan fertilitas laki-laki.⁷ Pembatasan fertilitas kaum perempuan dengan menggunakan alat teknologi, seperti alat kontrasepsi, yang akibat negatifnya lebih banyak ditanggung oleh perempuan.

Stereotype Gender

Seorang pendiri sosiologi, August Comte, dalam Helen A. Moor, menyatakan bahwa wanita secara sosiologi dibatasi perannya pada lingkup keluarga, dan bersifat subordinat.⁸ Dari segi konstitusional, posisi perempuan bersifat inferior terhadap laki-laki. Peran subordinat mengecilkan partisipatif di luar peran domestiknya, sekaligus mengingkari seluruh kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh perempuan.

Pelabelan negatif terhadap perempuan bukan dideterminasi oleh faktor kodrati, suatu keniscayaan di bawah sejak lahir, akan tetapi direkonstruksi oleh budaya paternalistik, dan maternalistik yang diperkuat dengan pandangan keagamaan. Budaya paternalistik berpandangan bahwa kaum laki-laki secara inheren dalam dirinya mempunyai potensi dan keunggulan dibandingkan dengan perempuan, sementara budaya maternalistik menempatkan peran-peran perempuan hanya cocok di lingkungan keluarga, melaksanakan

⁷ Ollenburger, Jane C, dan Helen A. Moore, *A Sociology of Women*, diterjemahkan oleh Budi Suchayono, Yan Sumaryana, dengan judul "Sosiologi Wanita", Cet. I; (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 65.

⁸. *Ibid.*, h. 67.

peran domestik. Di lingkungan keluarga, perempuan kehilangan otoritas terhadap laki-laki, dan laki-lakilah dianggap sebagai pemegang otoritas. Otoritas ini meliputi kontrol atas sumber-sumber ekonomi dan pembagian kerja secara seksual di dalam keluarga yang menurunkan derajat perempuan.

Collin melihat ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin dan kekerasan dapat dikategorikan dari dua sumber, yaitu; (1) struktur sosial seperti sistem sosial dan sistem politik serta kekuasaan menjadi instrumen penekan, termasuk otoritas kekuasaan yang berlebihan di lingkungan keluarga, dan (2) keadaan pasar, sumber-sumber penghasilan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini berkaitan dengan upacara keagamaan dan standar moralitas seksual.⁹

Perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan gender yang tampak sebagai fenomena sosial, yaitu (1) marginalisasi perempuan, (2) subordinasi karena perempuan dipandang secara negatif, emosional, irrasional, tidak dapat memimpin, (3) stereotype, artinya pelabelan negatif terhadap perempuan bahwa dia individu mempunyai kualitas fisik dan rohani yang berbeda dengan laki-laki, (4) kekerasan, yaitu baik secara fisik maupun tekanan psikhis-mental.¹⁰ Kekerasan perempuan adalah bias gender, disebut *gender related violence*.¹¹

Selanjutnya, Mansour Fakih menegaskan beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan, yaitu (a) pemerkosaan, (b) pemukulan atau serangan fisik, (c) penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, (d) kekerasan dalam bentuk pelacuran, pornografi, (e) kekerasan terselubung dan pelecehan seksual, (4) ketidakadilan dalam

⁹Ollenburger, Jane C, dan Helen A. Moore, *Op. cit.*, h. 16

¹⁰Amelia Fauzia, et. al, *Loc.cit.*

¹¹Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet.III; (Jakarta: Pustaka Pelajar,1997), h. 80

beban kerja, suatu kenyataan bahwa perempuan dibebani seluruh pekerjaan domestik yang berat.

Ideologi budaya patriarki sebagai kerangka pola perilaku sebagian masyarakat merefleksikan dominasi laki-laki dengan perempuan. Pelestarian dan pengsosialisasinya, telah membentuk pencitraan yang sangat kuat terhadap identitas gender dalam relasi-relasi sosial. Pada sektor profesi, misalnya menandai terjadinya maskulinisasi profesi pekerjaan, bidang agama, telah dijadikan sebagai instrumen pembiasan gender. Konstruksi tentang identitas gender telah berakar kuat di tengah-tengah sistem sosial, dikarenakan oleh tekanan sistem nilai-nilai yang berlapis-lapis, dan struktur sosial yang kuat, dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, struktur negara, dan sistem global yang mengikis peran-peran tradisional perempuan.¹²

Islam tentang Gender

Dalam pandang konservatif, bahwa perempuan ditakdirkan memainkan peran atau tugas tradisional dan domestik semata-mata, Islam tidak membenarkan perempuan berkiprah di luar peran domestiknya. Pada hal sejak 15 abad yang lampau, Al-Qur'an memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan, dan perbedaan yang ada tidak lebih adalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin. Prinsip persamaan kedudukan dalam hal, yaitu (1) pengabdian sebagai hamba, (2) status kejadian, (3) kemanusiaan, (4) pemilikan dan pengurusan harta. Bahkan menurut Nazaruddin Umar, penegasan Al Qur'an tentang identitas gender dilihat dari segi kebahasaan menggunakan lafaz *ar-Rijal* yang mempunyai arti gender laki-laki, *ar-Rijal* dalam arti

¹² Amelia Fauzia, *Op cit.*, h. 20

orang, *ar-Rijal* dalam arti Nabi atau Rasul, *ar-Rijal* dalam arti tokoh masyarakat, dan *ar-Rijal* dalam arti budak. Sedangkan *an-Nisa* dalam arti gender perempuan, *an-Nisa* dalam arti isteri-isteri.¹³

Al-Qur'an menegaskan beberapa prinsip kesetaraan gender, yaitu (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT, (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah SWT, (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, dan (5) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis.

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu diciptakan Allah SWT dengan kodrat masing-masing (Q.S, al-Qamar, 54;49). Baik laki-laki maupun perempuan, sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Meskipun demikian, tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir-hampir tidak terdapat perbedaan dari segi kemampuan dan potensinya.

Dilihat dari asal kejadian manusia, Al-Qur'an menegaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan diciptakan dari diri (*nafs*) yang satu (Q.S,4; 1). Terminologi "*nafs*" oleh sebagian orang mengatakan bahwa perempuan adalah sebahagian dari laki-laki, bahkan ada yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam As. Pandangan yang demikian, bisa dikatakan mendeskreditkan perempuan. Karena pada ayat lain, menyatakan bahwa manusia berasal dari perpaduan antara ovum dan sperma (Q.S, 3;195). Suatu penegasan bahwa secara teologi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diakui keadaannya.

Tidak dapat disangkal antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan kodrati, namun perbedaan itu tidak menunjuk

¹³Nasaruddin Umar, *Op.cit.*, h.

kepada keistimewaan salah satu jenis kelamin, tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir antara keduanya. Dalam pandangan Islam, Al Qur'an memuji *Ulil al Bab*, artinya siapa saja berpikir dan berdzikir tentang kejadian langit dan bumi, dalam rangka mengantar manusia mengetahui rahasia alam raya, adalah keniscayaan tidak terbatas pada kaum laki-laki, juga meliputi kaum perempuan, antara keduanya sejajar dalam potensi intelektualnya.

Al-Qur'an memang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan (Q.S, 3:34), hal ini tidak menunjuk kepada dominasi sosial budaya dan psikologis kaum laki-laki atas perempuan, dalam arti pemimpin yang sebenarnya dalam hirarki birokrasi, institusi sosial dan dominasi otoritas, akan tetapi ayat itu lebih mengandung muatan tanggung jawab terpikul oleh kaum laki-laki.

Kelembagaan Madrasah

Pengelolaan madrasah baik dari aspek pengembangan kelembagaan maupun mengenai pengembangan pendidikan, penyusunan kurikulum senantiasa mengacu pada sistem pengelolaan pendidikan nasional. Selain itu, dari segi keberadaannya, lembaga pendidikan madrasah dijamin oleh Undang-Undang SISDIKNAS setara dengan lembaga pendidikan lainnya, dan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan subsidi dari pemerintah.

Lembaga pendidikan madrasah di Kota Parepare secara umum dikategorikan kedalam beberapa hal, yaitu (1) dikelola secara swadaya oleh masyarakat, dalam hal ini organisasi sosial keagamaan, yang mengembangkan tingkat pendidikan mulai dari Madrasah Ibtida'iyah Swasta (MIS), tingkat Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs), dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS), seperti yang diselenggarakan oleh

DDI dan NU, (2) diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1 dan MAN 2), (3) jenis kelembagaan pendidikan Madrasah Aliyah dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dan Madrasah Aliyah Umum (MAU). Kedua jenis kelembagaan ini menggunakan sistem kurikulum dengan orientasi yang berbeda, yaitu bidang keagamaan dan umum yang meliputi rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pembidangan ilmu ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kecenderungan, bakat dan potensi siswa, sekaligus sebagai bagian dari upaya pengembangan kelembagaan madrasah. Yang paling utama adalah agar output madrasah dapat diserap pada perguruan tinggi umum.

1. Profil Tenaga Guru

Guru adalah tenaga profesional yang mempunyai tugas-tugas fungsional dan tanggung jawab terhadap pendidikan dan pengajaran. Sebagai tenaga profesional, maka guru disyaratkan seyogyanya memenuhi standar kompetensi agar tugas profesionalnya yang diembangkannya dapat terlaksana dengan baik.

Tabel : Profil Tenaga Guru Madrasah di Kota Parepare

No	Jenis Madrasah	Jml Siswa	Status Kepegawaian Guru			Jl
			PNS	Non PNS	PNS Diknas	
1.	Ibtida'iyah	539	32	14	4	50
2.	Tsanawiyah	784	57	55	1	113
3.	Aliyah	745	62	45	2	109
Jumlah		2.068	151	114	7	212

Sumber Data: Bagian Administrasi Kementerian Agama Parepare

Berdasarkan tabel di atas, maka rasio perbandingan guru dengan siswa Madrasah yaitu antara 212: 2.068 atau 1: 10, artinya setiap guru menghadapi 10 siswa. Rasio ini menggambarkan suatu tingkat proporsional, sebanding antara populasi siswa dengan kebutuhan terhadap guru. Oleh karena rasio antara guru dan siswa sudah sebanding, maka yang diperlukan aspek keprofesionalan dan kompetensi seorang guru. Diantara problema ketenagaan guru madrasah adalah kualifikasi pendidikan dengan kompetensinya. Salah satu indikator keprofesionalan adalah seorang guru mengajar bidang studi sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

Tabel : Guru PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenjang Madrasah	Laki-Laki		Perempuan		Total
		Jml	f %	Jml	f %	
1.	Ibtida'iyah	7	19,44	29	80,56	36
2.	Tsanawiyah	25	43,10	33	56,90	58
3.	h Aliyah	35	54,69	29	45,31	64
Jumlah		76	42,41	91	57,59	158

Sumber Data: Bagian Adaministrasi Kementerian Agama Parepare.

Kebanyakan perempuan yang terserap sebagai tenaga guru pada Madrasah. Guru perempuan dari 158 guru yaitu 91 orang atau 57,59 %, sedangkan laki-laki sebanyak 67 orang atau 42,1 %. Dari segi jenjang pendidikan, maka gambarannya adalah Madrasah Ibtida'iyah; laki-laki 7 orang atau 19,44 %, perempuan 29 orang atau 80,56 %. Madrasah Tsanawiyah; laki-laki 25 orang atau 43,10 %, perempuan 33 orang atau 56,90 %. Dan untuk tingkat Madrasah Aliyah; laki-laki 35

orang atau 54,69 %, sedangkan perempuan sebanyak 29 orang atau 45,31 %. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak menimbulkan bias gender. Laki-laki dan perempuan terserap sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan berlatar belakang keahlian yaitu kependidikan.

Dari segi kualifikasi pendidikan guru menurut jenis kelamin, maka terdapat perbedaan dan bervariasi pada setiap lembaga pendidikan di Madrasah. Kelihatannya aspek ini membuka kesempatan bagi setiap guru tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki dan perempuan) untuk mengembangkan potensi dan kualitasnya.

Tabel : Tingkat Pendidikan Guru menurut Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Madrasah						Jl
		Ibtida'iyah		Tsanawiyah		Aliyah		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1.	SLTA/MA	4	18	11	9	2	2	46
2.	S1/Sarjana	3	11	13	24	25	26	102
3.	S2	-	-	1	-	8	1	10
Jumlah			29	25	33	35	29	158

Sumber Data: Bagian Administrasi Kementerian Agama Parepare.

Data di atas menunjukkan bahwa sekitar 46 guru Madrasah yang berpendidikan SLTA/Sederajat atau 29,11 %, pendidikan S1/Sarjana sebanyak 102 orang atau 64,56%, dan pendidikan S2 sejumlah 8 orang atau 5,06 %. Dari segi jenjang pendidikan ini, khususnya pada strata pendidikan S1 menunjukkan bahwa guru perempuan dapat bersaing dengan laki-laki, akan tetapi dari segi strata

pendidikan S2 dimana perempuan hanya 1 orang atau 0,63 %, sedangkan laki-laki sebanyak 8 orang atau 5,063 %.

2. Aspek Interaksi dan Relasi Gender

Proses mengkulturnya pemahaman aspek keagamaan di Madrasah terutama pada Madrasah yang berbasis pendidikan pesantren, merupakan faktor yang turut menentukan model, wujud relasi gender yang terjadi dalam berbagai interaksi sosial. Madrasah yang kuat akar pemahamannya berpandangan bahwa perempuan mempunyai ruang-ruang interaksi tertentu. Tidak semua ruang interaksi memberikan fasilitas yang setara dan sama antara laki-laki dan perempuan. Karena doktrin agama yang diyakini memberikan pembatasan etika antara laki-laki dan perempuan pada setiap kegiatan proses interaksi sosial.

Tabel : Birokrasi dan Relasi Gender

No.	Jabatan Tingkat Madrasah	Relasi Gender			
		Lk	f %	Pr	f %
1.	Kepala Madrasah	17	77,27	5	22,73
2.	Wkl Bid.	16	72,72	6	27,28
3.	Pendidikan	16	72,72	6	27,28
4.	Wkl Bid. Kurikulum	15	68,18	7	31,82
5.	Wkl Bid. Siswa	28	39,44	43	60,56
6.	Wali Kelas	15	68,18	7	31,82
7.	Kepala TU Pustakawan	18	81,81	4	18,19
Jumlah N=203		125	61,58	78	38,42

Sumber Data: Kajian Dokumen

Tabel ini menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan dalam birokrasi Madrasah/sekolah. Secara umum menunjukkan gejala masih

kurang pada setiap level birokrasi Madrasah/sekolah. Persoalan ini sebagai sesuatu gejala yang melembaga, karena tingkat-tingkat partisipasi perempuan mengalami ketidakseimbangan tidak semata-mata terjadi di madrasah, tetapi secara umum juga terjadi pada birokrasi lain. Khusus pada level Kepala Sekolah/Madrasah dikontrol oleh laki-laki sebanyak 17 orang atau 77,27 %, sedangkan perempuan hanya 5 orang atau 22,73 %.

Posisi perempuan dalam struktur birokrasi sekolah di samping lemah, demikian pula dalam hal kapasitas yang dimilikinya untuk bersaing dengan laki-laki. Dominasi laki-laki menandai sistem kepemimpinan di madrasah, yang menyebabkan perempuan terbatas wilayah aktualisasinya.

Tabel : Pembelajaran dan Relasi Gender

No	Model Interaksi Relasi	Keterlibatan			
		Lk	f %	Pr	f %
1.	Memberikan tugas-tugas	21	70,0	9	30,0
2.	Menyelesaikan Jawaban	27	90,0	3	10,0
3.	Memecahkan masalah	28	93,3	2	6,7
4.	Membantu dalam Mengajar	26	86,7	4	13,3

Sumber Data: Diolah dari Hasil Wawancara.

Dari segi keterlibatan siswa Madrasah, ternyata guru memberikan peran partisipasi yang tinggi kepada siswa laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Persoalan menyelesaikan tugas; laki-laki 21 orang atau 70,0 %, sementara perempuan 9 orang atau 30,0 %. Tugas menyelesaikan jawaban; laki-laki 27 orang atau 90,0 %, perempuan 3 orang atau 10,0 %. Tugas memecahkan masalah; laki-laki 28 orang atau 93,3 % dan perempuan 2 orang atau 6,7 %. Keterlibatan

membantu mengajar; laki-laki 26 orang atau 86,7 %, sedangkan perempuan 4 orang atau 13,3 %. Tampaknya tidak dapat dipungkiri bahwa siswa laki-laki pada kenyataannya sering memperlihatkan keaktifan melebihi perempuan.

Tabel : Pembinaan dan Relasi Gender

No	Jenis Pembinaan	Jenis Kelamin			
		Lk	f %	Pr	f %
1.	Pembinaan Kepangkatan	19	63,4	11	36,6
2.	Pembinaan Fungsional	17	56,6	13	43,4
3.	Seminar, pelatihan	15	50,0	15	50,0
N = 30		51	56,7	39	43,3

Sumber Data: Wawancara

Dalam hal pembinaan, setiap guru mempunyai kesempatan, baik laki-laki maupun perempuan, yang sama. Pembinaan kepangkatan terbuka peluang tanpa membedakan jenis kelamin; laki-laki 19 orang atau 63,4 %, sementara perempuan 11 orang atau 36,6 %. Pembinaan fungsional; laki-laki 17 orang atau 56,6 %, dan perempuan 13 orang atau 43,3 %. Aktivitas lain, seperti seminar dan pelatihan; laki-laki 15 orang atau 50,0 %, sementara 50 orang atau 50,0%.

Karakterisasi jenis kelamin tampaknya bukan faktor yang menentukan terhadap pembinaan guru madrasah. Pelukisan bahwa guru laki-laki sebagai orang jujur, kreatif, berani, otonom, dan menghormati diri sendiri, memang merupakan gejala umum dari watak laki-laki. Akan tetapi, kadang-kadang perempuan juga memiliki sifat-sifat aktif yang demikian. Tidak selamanya, perempuan memiliki sifat-sifat pasif seperti tanggungan, tidak otonom. Untuk itu,

seyogyanya pola-pola pembagian pengembangan diri berdasarkan jenis kelamin bukan merupakan yang laten, dan menghambat kemajuan guru perempuan.

Tabel 7. Peran Jenis Kelamin dalam Naskah Pembelajaran

No	Jenis Naskah	Jenis Kelamin				%
		Lk	f %	Pr	f %	
1.	Naskah Pendidikan	25	83,3	5	16,7	30
2.	Agama	16	53,3	14	46,7	30
3.	Naskah PKN	19	63,3	11	36,7	30
4.	Naskah IPS Naskah Bahasa	22	73,3	8	26,7	30

Sumber Data: Wawancara

Diantara instrumen pendidikan sebagai faktor determinan terhadap keberhasilan pembelajaran di madrasah. Pemilihan materi pembelajaran disamping harus memperhatikan kebutuhan siswa, daya serap siswa, dan tingkat kemampuan intelektual siswa, tetapi yang lebih penting adalah memperhatikan aspek-aspek kesetaraan diantara siswa. Naskah pembelajaran harus mengindahkan perlakuan diskriminatif terhadap siswa. Sesuai data yang dikumpulkan, untuk naskah materi pendidikan agama lebih memberikan peran yang berarti terhadap laki-laki, yaitu 25 orang atau 83,3 %, sementara perempuan sekitar 5 orang atau 16,7%. Demikian pula pada naskah-naskah materi bahasa, memberikan informasi yang kuat terhadap laki-laki; 22 orang atau 73,3 %, sementara perempuan sekitar 8 orang atau 26,7%. Naskah materi IPS juga mengutamakan informasi terhadap laki-laki; 19 orang atau 63,3% dan perempuan 11 orang atau 36,7%. Berbeda pada naskah PKN memberikan informasi yang seimbang antara laki-laki dengan perempuan (16 orang atau 53,3% dan 14 atau 46,7%).

Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender

Kajian teoritis terhadap penyebab ketidaksetaraan gender dalam berbagai setting sosial, memunculkan beragam sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. August Comte, menilai realitas sosial wanita bahwa ia secara konstitusional bersifat inferior terhadap laki-laki, wanita menjadi subordinat laki-laki. Berbeda Herbert Spencer, bahwa wanita mempunyai fungsi utama dilingkungan keluarga, ia sebagai komponen penyeimbang dan integrasi dalam unit keluarga, sementara laki-laki membuka hubungan antara keluarga dan organisasi sosial dalam masyarakat (Helen A. Noor, 1996).

Perbedaan peran dan fungsi berawal dari kodrat kemampuan yang berbeda. Bagi aliran positivisme menyatakan bahwa kemampuan intelektual lebih rendah dan sekaligus unsur pembeda dengan laki-laki. Diakui memang bahwa laki-laki memiliki sifat-sifat aktif, sementara perempuan memiliki sifat pasif. Akan tetapi hal itu bukan sifat-sifat alamiah yang tetap dan tidak dapat diubah. Dalam konteks ini, kondisi sosial yang konstruktif sangat diperlukan untuk menghilangkan pelukisan feminisasi dan maskulinisasi. Kematangan persepsi dan pandangan yang berkembang di masyarakat terhadap sesuatu sifat yang dilekatkan pada jenis kelamin. Karena begitu memiliki kematangan dan mengakar kuat di masyarakat, sehingga sebahagian sosiolog memandang bahwa mengurangi penindasan-penindasan yang berbau diskriminatif seperti gerakan feminisasi, merupakan potensi yang dapat menciptakan ketidakseimbangan. Justeru Emile Durkheim, memandang bahwa keterlibatan wanita dalam pasar kerja merupakan faktor kohesi sosial.

Fenomena kesetaraan gender bukan semata-mata merupakan persoalan makro sosiologi, persoalan struktur yang terjadi pada setting

institusional, akan tetapi juga merupakan persoalan mikro sosiologi yang terjadi dalam setting sosial biasa, seperti dalam interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Dari perspektif sosiologi, sekolah pada umumnya dan secara khusus madrasah merupakan lembaga sosialisasi dan menyerap nilai-nilai baru, setting sosial yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial. Dengan demikian, pola-pola hubungan yang ada di lingkungan masyarakat dapat dijumpai di lingkungan madrasah. Untuk itu, tidak mengherankan jika di madrasah terjadi pola relasi dan interaksi yang menggambarkan hubungan kelas dan diskriminatif.

Berdasarkan dengan data yang diperoleh tentang relasi gender di madrasah, maka dapat digambarkan beberapa persoalan kesetaraan gender yang terjadi di madrasah, yaitu sebagai berikut;

1. Kondisi positif kesetaraan dalam hal penyerapan guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengabaikan *stereotype* jenis kelamin. Perempuan dengan kapasitasnya dapat bersaing mengisi peluang pasar kerja sebagai guru di madrasah. Sifat-sifat alamiah wanita bukan merupakan faktor penghambat dalam mengisi peluang sebagai guru. Bahkan dapat dikatakan dengan banyaknya guru perempuan melaksanakan fungsi profesionalnya, menunjukkan bahwa sifat-sifat pasif perempuan jika dimodifikasi akan lebih memberikan keseimbangan dalam sistem persekolahan/madrasah. Suatu kenyataan bahwa pada umumnya guru perempuan Madrasah Ibtidai'yah (MI) berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), meskipun demikian, guru perempuan telah memainkan fungsi-fungsi sosial yang sangat berarti dan tidak menempatkannya sebagai posisi subordinat dari laki-laki dari segi pasar kerja. Sementara guru perempuan untuk

tingkat Madrasah Aliyah (MAS dan MAN), kebanyakan berpendidikan sarjana(S1) dengan disiplin ilmu yang beragam. Suatu indikator bahwa perempuan dapat melakukan proses adaptasi dengan lingkungan kerjanya dari kualifikasi pendidikan.

2. Maskulinisasi sebagai karakterisasi dalam birokrasi madrasah, jabatan-jabatan dalam struktur madrasah didominasi oleh guru laki-laki. Guru perempuan kebanyakan ditempatkan sebagai guru bidang studi ataukah kelas, sementara pada struktur yang lebih strategi dan menuntut tanggung jawab lebih besar dikuasai oleh guru laki-laki. Kondisi ini dilatari oleh sifat-sifat kodrati perempuan yang inheren menciptakan suatu pembagian kerja, hirarki otoritas laki-laki, dan struktur moralitas. Sifat-sifat tersebut, menyebabkan perempuan dibawah kontrol laki-laki dalam keluarga, sekolah dan struktur sosial. Penyebab lain, berasal dari mental apriori laki-laki yang belum siap menerima perempuan sebagai penanggungjawab puncak dalam struktur organisasi tertentu, termasuk struktur madrasah. Dengan demikian, posisi struktur disterilkan dengan pandangan maskulinisasi sehingga laki-laki dapat mempertahankan dalam waktu yang lama posisi strukturalnya pada birokrasi madrasah.
3. Pelukisan feminisasi dalam pola pembelajaran sebagai suatu kenyataan lain di madrasah, dari pelajaran guru di kelas, para siswa juga mempelajari perilaku dan harapan yang meluas di luar pelajaran di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Guru sering menggambarkan terhadap prestasi dan perilaku siswa dan perempuan di kelas, secara konsisten terdapat perbedaan. Guru memberikan penguatan pencitraan yang lebih tinggi terhadap

laki-laki yang berprestasi dan sukses dibandingkan dengan perempuan.

Interaksi guru dengan siswa di madrasah memperlihatkan pola-pola penguatan hirarki jenis kelamin. Guru lebih sering memberikan kesempatan kepada siswa laki-laki menyelesaikan tugas-tugas, memecahkan masalah, membuka dialog-tanya jawab, atautkah membantu guru dalam mengajar. Memberikan dorongan kepada siswa laki-laki guna menemukan jawabannya sendiri atas pertanyaan yang ada. Tingkat persentase keterlibatan yang tinggi dari siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan menandai proses pembelajaran. Aspek kesetaraan tanpa membedakan status dan jenis kelamin masih sering terjadi, dimana kondisi seperti ini adalah sangat tidak relevan dengan prinsip utama pendidikan, yaitu keadilan tanpa diskriminatif.

Relasi guru dengan siswa dalam pembelajaran masih memberikan penguatan yang kuat terhadap maskulinisasi dari pada relasi yang berkarakter femenisasi. Dengan tidak disadari bahwa iklim yang dikembangkan adalah pola penguatan kepasifa terhadap perempuan merupakan suatu tantangan relasi gender secara institusional.

Pendidikan merupakan proses pembentukan jati diri siswa tidak perlu dijadikan sebagai wahana yang mengabaikan kesetaraan, keadilan, kebersamaan, dan solidaritas. Untuk itu, peran jenis kelamin harus diberikan proporsi pelakuan yang sama, tanpa perlu terpengaruh dengan sifat-sifat aktif yang inheren dari siswa laki-laki, seperti jujur, kreatif, berani, mandiri, dan melindungi. Atau sifat-sifat pasif dari siswa perempuan, seperti dilindungi, kurang mandiri, tidak kreatif.

4. Madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan memainkan fungsi pelayanan atas dasar kesetaraan menyangkut pembinaan terhadap guru. Pembinaan karir/kepangkatan guru, pembinaan fungsional dan kesempatan aktif dalam kegiatan peningkatan kemampuan, secara merata diperlakukan pada guru tanpa membedakan jenis kelamin. Para guru menerima perlakuan yang seimbang untuk mengembangkan seluruh potensialitasnya agar lebih teraktualisasi. Secara formal, kenaikan pangkat administrasi dan fungsional guru harus didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat formal sesuai aturan yang berlaku, seperti didasarkan pada angka kredit.

Proses mendapatkan dan memenuhi syarat-syarat itu memungkinkan dapat terganggu karena tekanan peran domestik perempuan. Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa peran domestik menyita waktu yang banyak bagi perempuan, dan sering didahulukan, sehingga penyelesaian tugas-tugas profesional, pengurusan kenaikan pangkat tidak dapat dimaksimalkan. Perempuan sering mengeluh disebabkan oleh tugas domestik di lingkungan keluarga banyak waktu kesibukan. Pengaturan tugas domestik dibutuhkan dengan membangun kesepakatan antara semua anggota keluarga, bahwa tugas domestik bukan sesuatu yang dogmatis dan dibebankan secara mutlak terhadap perempuan.

Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dengan guru laki-laki untuk mendapatkan kesempatan berkarir, mengurus kenaikan pangkat, mengembangkan kemampuan fungsional, dan melibatkan diri mereka pada berbagai kegiatan, pelatihan yang tujuannya untuk mengembangkan diri sebagai guru.

5. Realitas kesetaraan gender di madrasah direfleksikan pula dalam naskah-naskah materi pembelajaran. Pada aspek ini, menciptakan kondisi perbedaan yang menyolok tentang peran jenis kelamin. Terdapat ketidakseimbangan proporsional yang merugikan perempuan. Naskah materi pembelajaran agama tanpa disadari telah melanggengkan peran gender yang mengecilkan peran perempuan. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa agama menjadi doktrin yang memperkuat budaya patriarki dalam berbagai sistem sosial masyarakat. Karenan kuatnya tekanan sosial keagamaan membuat perempuan kehilangan kesempatan mengembangkan diri, kurang dapat merealisasikan peran-peran sosial setara dengan laki-laki.

Keberadaan madrasah dilatari dengan pandangan keagamaan, dimana pandangan itulah yang juga merupakan latarbelakang sosial keagamaan para guru. Latarbelakang pandangan keagamaan yang sering menimbulkan ekes yang menyudutkan perempuan, artinya konstruksi stereotype yang tidak adil terhadap perempuan bukan tidak mungkin berasal dari pandangan keagamaan.

Maskulinisasi naskah pembelajaran di madrasah telah mengsosialisasikan pandangan keliru, memungkinkan diterima sebagai padangan agama yang sebenarnya dan mengkultur di lingkungan sosial keagamaan yang merugikan. Proporsi naskah pembelajaran yang mengabaikan aspek-aspek kesetaraan gender terjadi karena cara pemahaman agama yang kurang menguatkan nilai-nilai sosial. Agama seringkali dijadikan instrumen untuk melanggengkan persepsi negatif terhadap perempuan karena beberapa sebab, yaitu (1) pemahaman secara doktrinal,

konvensional terhadap teks-teks keagamaan, (2) latarbelakang pemahaman keagamaan masyarakat yang berbeda, juga menyangkut kualitas dan pandangan yang luas terhadap ajaran agama, dan (3) pemahaman agama yang kurang memperhatikan aspek sosialnya, nilai-nilai sosial keagamaan, termasuk nilai kesetaraan gender, maka akibatnya agama menjadi instrumen yang melemahkan kesetaraan, keadilan, solidaritas kebersamaan diantara anggota masyarakat. Kulturasasi pemahaman agama yang mengenyampingkan kesetaraan gender berlangsung melalui proses pendidikan atau pengalaman keagamaan yang diperoleh di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penutup

Sistem relasi gender yang tampak di madrasah dipengaruhi oleh faktor, yaitu (1) pola pandangan keagamaan yang diyakini memberikan ruang dominasi peran dan fungsi yang lebih luas kepada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, (2) pola-pola perilaku yang mengakomodir budaya patriarki yang hidup dan menandai relasi dan interaksi social yang terjadi di madrasah. Karena ke dua faktor itu mewujudkan gejala relasi gender yang tidak setara yang merugikan pihak perempuan dalam hal peluang untuk mengaktualkan segala potensinya.

Proses maskulinisasi dapat dilihat dari segi birokrasi madrasah yang cenderung mengecilkan potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan, hal ini berakibat terhadap peran yang dominan dimainkan oleh laki-laki. Dari aspek pembelajaran juga terjadi maskulinisasi baik dalam aktivitas atau interaksi pembelajaran, maupun yang menyangkut tentang sumber-sumber material yang diajarkan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, Adriana. 2006, *Jurnal Perempuan "Pengarusutamaan Gender"*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Anwar, Arifin. 2003, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Fakih, Mansour. 2000, *Membincang Femenisme Diskursus Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti.
- Fakih, Mansour. 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Faiqoh, 2003. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Fauzia, Amelia, et.al., 2004, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di Universitas Negeri Jakarta*, kerjasama dengan Mc. Gill IAIN-Indonesia Social Enquity Project.
- Nursyahid, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: BP. Panca Usaha
- Ollenburger, Jane C, dan Helen A. Moore, 1996. *A Sociology of Women*, diterjemahkan oleh Budi Sucahyono, Yan Sumaryana, dengan judul "Sosiologi Wanita", Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Umar, Nasaruddin, 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, Jakarta: Paramadina.